DIGITALISASI PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DESA CIKONDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.

Tanti Kirana Utami
Universitas Suryakancana
Email tantikiranautami@unsur.ac.id

Nurul Lestari
Universitas Suryakancana
Email nurullstri23@gmail.com
Koresponden

Cep Hidayat
Universitas Suryakancana
Email cepiimt2020@gmail.com

Rindi Antika
Universitas Suryakancana
Email atikaindi43@gmail.com

Syahfa Shakila
Universitas Suryakancana
Email syahfa2005@gmail.com

Ahmad Rinaldy
Universitas Suryakancana
Email ahmadrinaldy020204@gmail.com

Idris Junaedi
Universitas Suryakancana
Email Idrisjunaedi014@gmail.com

Diterima : 2026-08-15 Direvisi : 2026-11-15 Disetujui : 2026-11-17

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a key pillar of Indonesia's economy, yet many rural MSMEs, including those in Cikondang Village, Cianjur Regency, still operate conventionally, limiting their competitiveness and market access. This community service program aimed to analyze the initial condition of MSME digitalization and implement digital transformation strategies to improve business capacity. The program was carried out through the Student Community Service (KKN) using the Participatory Action Research (PAR) method. The activities focused on three main programs: assisting MSMEs in creating and activating the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), mapping business locations through Google Maps (Google Business Profile), and conducting seminars on digital marketing and financial literacy. The findings showed that digital adoption was initially low due to limited digital literacy and the predominance of older business owners. After the program, MSMEs successfully adopted QRIS, established verified digital business locations, and improved their understanding of digital promotion. These outcomes are expected to strengthen MSME competitiveness, expand market access, and support local government policies on MSME development and digital transformation.

Keywords: *MSMEs, Digitalization, QRIS, Google Maps, Community Service*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Peran UMKM tidak hanya terlihat dari jumlah unit usaha yang mendominasi struktur ekonomi nasional, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan berbagai kajian, UMKM mampu menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan sektor usaha besar ketika menghadapi gejolak ekonomi, sehingga keberadaannya menjadi salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit usaha dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional, sekaligus menyerap

sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan daya saing
UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.[1]

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia. Tingginya jumlah penduduk, berkembangnya sektor industri, perdagangan, pertanian, dan ekonomi kreatif menjadikan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan UMKM. Perkembangan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Jawa Barat masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti akses pembiayaan, kualitas regulasi, jaringan bisnis, adopsi teknologi digital, dan kapasitas sumber daya manusia. Lingkungan regulasi yang kondusif, kemudahan memperoleh pembiayaan, serta kolaborasi antar pelaku usaha terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Jawa Barat.[2]

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi UMKM cukup besar, terutama pada sektor kuliner, pertanian, perdagangan, kerajinan, dan industri rumah tangga. Sebagian besar UMKM di Cianjur masih berskala mikro dengan karakteristik usaha keluarga yang mengandalkan pemasaran secara konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing UMKM relatif terbatas, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari agar UMKM mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan transaksi, akses informasi, dan layanan berbasis teknologi.Urgensi digitalisasi UMKM diera saat ini.

Era transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat sekaligus cara pelaku usaha menjalankan bisnisnya. Digitalisasi UMKM tidak lagi sebatas pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, tetapi juga mencakup penggunaan sistem pembayaran digital, pemetaan lokasi usaha melalui platform digital, hingga pemanfaatan berbagai aplikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu bentuk digitalisasi yang saat ini berkembang pesat adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran non-tunai. Implementasi QRIS memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, antara lain mempercepat proses

[1] Nana Casmana, Ade Wikarta, and Sofi Defiyanti, "Usaha Dan Sebaran Wilayah Di Jawa Barat Dengan Clustering K-Means" 13, no. 3 (2023): 494–504.

[2] E. Y. Utami, A. F. Lubis, and Herry Ramadhani, "The Effect of Regulatory Environment, External Financing, and Business Networks on MSME Growth in West Java," *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 3 (2024): 355–65.

transaksi, meningkatkan keamanan pembayaran, memperluas akses terhadap konsumen digital, serta mendukung inklusi keuangan. Namun demikian, keberhasilan implementasi QRIS sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital pelaku UMKM dan intensitas pendampingan yang diberikan kepada masyarakat. [3]

Selain sistem pembayaran digital, keberadaan lokasi usaha pada platform digital seperti Google Maps juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan visibilitas UMKM. Informasi lokasi yang mudah diakses memungkinkan konsumen menemukan usaha dengan lebih cepat, meningkatkan kepercayaan pelanggan, sekaligus memperluas peluang pemasaran berbasis lokasi. Penelitian mengenai digitalisasi pedesaan di Jawa Barat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan potensi desa mampu meningkatkan akses informasi masyarakat serta mendukung pengembangan ekonomi lokal secara lebih efektif.[4]

Desa Cikondang merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi ekonomi berbasis UMKM, terutama pada sektor perdagangan, kuliner, dan usaha rumahan. Sebagian besar pelaku UMKM di desa ini masih menjalankan usahanya secara konvensional, baik dalam sistem pembayaran maupun pemasaran. Hasil observasi awal tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki QRIS sebagai metode pembayaran digital, belum terdaftar pada layanan pemetaan digital seperti Google Maps, serta masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai strategi pemasaran digital. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi lokal belum berkembang secara optimal, meskipun produk yang dihasilkan memiliki peluang untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Landasan hukum pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cianjur diatur melalui dua aturan hukum daerah. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, yang ditetapkan pada 23 Maret 2020, menjadi payung hukum utama di tingkat kabupaten yang mengatur kerangka pemberdayaan, pengembangan, sekaligus perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro di wilayah Cianjur. Kedua, sebagai aturan pelaksana yang lebih teknis, diterbitkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2023 tentang

[3] Hersatoto Listiyono, Eko Nur Wahyudi, and Dwi Agus Diartono, "Dinamika Implementasi QRIS : Meninjau Peluang Dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia" 8, no. 2 (2024): 120–26.

[4] Rizki Adam Kurniawan4 Dyana Chusnulitta Jatnika1, Dimas Dwiki Jatnika2, Muhamad Burhanudin3, "Pemetaan Potensi Digitalisasi Pedesaan Dalam Program Akademi Desa Juara" 5, no. 2 (2024).

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada 20 Maret 2023, yang secara eksplisit merujuk pada Perda Nomor 4 Tahun 2020 sebagai salah satu dasar hukumnya. Perbup ini menegaskan bahwa usaha mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah, perlu diberdayakan melalui lima pendekatan utama: pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, peningkatan produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, serta pengembangan kemitraan, jaringan usaha, dan pemasaran. Kelima aspek tersebut relevan sebagai kerangka rujukan dalam menilai sejauh mana program digitalisasi UMKM (QRIS, pemetaan lokasi digital, dan literasi digital) di Desa Cikondang sejalan dengan arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya pada aspek pengembangan SDM serta perluasan jaringan usaha dan pemasaran.[5]

Pengembangan UMKM melalui digitalisasi juga memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Digitalisasi UMKM berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup masyarakat melalui peningkatan produktivitas usaha, kenaikan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, serta meningkatnya literasi digital masyarakat. Di sisi lain, peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui digitalisasi UMKM di Desa Cikondang. Program tersebut meliputi pendampingan pembuatan dan aktivasi QRIS sebagai sistem pembayaran digital, pemetaan lokasi usaha menggunakan Google Maps untuk meningkatkan aksesibilitas dan promosi usaha, serta penyelenggaraan seminar dan sosialisasi mengenai pentingnya digitalisasi UMKM, pemasaran digital, dan literasi keuangan. Ketiga program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing usaha, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Cikondang. Temuan berbagai program pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan implementasi QRIS, digital mapping, dan edukasi digital mampu meningkatkan

[5] Bupati Cianjur, "Peratiuran Bupati Cianjur, Nomor: 15 Tahun 2023, Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro," 2023.

kesiapan transformasi digital UMKM di tingkat desa sehingga menjadi strategi yang relevan untuk diterapkan dalam kegiatan KKN.[6]

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cikondang, Kabupaten Cianjur, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR*) yang melibatkan pelaku UMKM dan pemerintah desa dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, pelaksanaan program, hingga evaluasi.

Tahap awal dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi kondisi digitalisasi UMKM. Berdasarkan hasil identifikasi, program difokuskan pada tiga kegiatan, yaitu pendampingan pembuatan dan aktivasi QRIS sebagai sistem pembayaran digital, pendampingan pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps, serta sosialisasi mengenai digitalisasi UMKM yang mencakup literasi digital dan pemasaran digital.

Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi dan wawancara untuk menilai ketercapaian program, yang diukur berdasarkan peningkatan jumlah UMKM yang telah menggunakan QRIS, terdaftar di Google Maps, serta meningkatnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pemanfaatan teknologi digital. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil implementasi program digitalisasi UMKM di Desa Cikondang.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal Digitalisasi UMKM di Desa Cikondang

Sebelum pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Desa Cikondang memiliki potensi UMKM yang cukup besar dengan beragam produk unggulan yang dihasilkan masyarakat, baik di bidang kuliner, kerajinan, maupun produk olahan lokal. Potensi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian desa dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengembangan usaha.

[6] Annisa Uswatun Khassanah et al., "Pengembangan Umkm Desa Melalui Digitalisasi : Studi Implementasi Qris , Shopee , Dan Shopee Food" 8, no. 6 (2024): 4–12.

Berdasarkan hasil observasi awal selama pelaksanaan KKN, mayoritas pelaku UMKM di Desa Cikondang merupakan kelompok usia dewasa hingga lanjut usia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat digital, seperti telepon pintar, media sosial, maupun platform marketplace. Akibatnya, kegiatan pemasaran masih didominasi oleh metode konvensional, yaitu melalui penjualan langsung, promosi dari mulut ke mulut, serta mengandalkan pelanggan tetap di lingkungan sekitar. Pemanfaatan media digital sebagai strategi pemasaran maupun perluasan jaringan pasar masih sangat terbatas.

Selain keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi, rendahnya literasi digital juga menjadi faktor yang menghambat proses digitalisasi UMKM. Sebagian pelaku usaha belum memahami manfaat penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, pentingnya identitas merek (branding), dokumentasi produk yang menarik, hingga pemanfaatan aplikasi digital untuk pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan usaha. Kondisi tersebut mengakibatkan daya saing produk UMKM belum berkembang secara optimal, terutama dalam menjangkau konsumen di luar wilayah Desa Cikondang.

Permasalahan tersebut sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama transformasi digital UMKM di Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pengetahuan teknologi informasi, serta karakteristik pelaku usaha yang didominasi oleh usia yang relatif lebih tua sehingga cenderung mengalami kesulitan dalam mengadopsi inovasi digital. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap manfaat digital marketing menyebabkan pelaku UMKM belum memanfaatkan berbagai platform digital secara maksimal untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi belum menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha UMKM di Desa Cikondang. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang tidak hanya memperkenalkan penggunaan teknologi digital, tetapi juga meningkatkan literasi digital pelaku UMKM melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta praktik langsung mengenai pemasaran digital, pembuatan akun media sosial usaha, penyusunan konten promosi, dan pemanfaatan platform digital lainnya. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap perkembangan teknologi sehingga produk lokal Desa Cikondang memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

B. Implementasi Digitalisasi dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM Di Desa Cikondang.

Implementasi digitalisasi UMKM di Desa Cikondang dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu pendampingan pembuatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pemetaan lokasi usaha menggunakan Google Maps, serta penyelenggaraan seminar dan sosialisasi mengenai digitalisasi UMKM. Ketiga program tersebut dirancang berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Cikondang masih menjalankan usahanya secara konvensional. Kondisi tersebut ditandai dengan belum tersedianya sistem pembayaran digital, rendahnya pemanfaatan platform digital sebagai media promosi, serta terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing usaha. Oleh karena itu, implementasi program digitalisasi difokuskan pada peningkatan literasi digital sekaligus pendampingan praktik penggunaan teknologi yang dapat diterapkan secara langsung oleh pelaku UMKM.

1. Pendampingan Pembuatan QRIS

   Pendampingan pembuatan QRIS dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan adopsi sistem pembayaran digital pada UMKM di Desa Cikondang. Kegiatan diawali dengan identifikasi pelaku usaha yang belum memiliki QRIS, kemudian dilanjutkan dengan proses registrasi, verifikasi data usaha, hingga aktivasi QRIS melalui penyedia jasa pembayaran. Selain itu, pelaku UMKM memperoleh pendampingan mengenai tata cara penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari, mekanisme pencairan dana, serta manfaat penggunaan pembayaran digital dalam mendukung pengelolaan usaha.

   Pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sebelumnya masih mengandalkan transaksi secara tunai. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya literasi digital serta minimnya informasi mengenai prosedur pembuatan QRIS. Setelah memperoleh pendampingan, pelaku UMKM mulai memahami bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai, tetapi juga memberikan kemudahan dalam proses transaksi, meningkatkan keamanan pembayaran, mengurangi penggunaan uang tunai, serta mendukung pencatatan transaksi yang lebih tertib. Kemudahan tersebut berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan usaha dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

   Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho yang menyatakan bahwa implementasi QRIS mampu meningkatkan kesiapan digital

UMKM serta memperkuat inklusi keuangan melalui pemanfaatan sistem pembayaran elektronik. Demikian pula penelitian Syafitri dkk. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan QRIS memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai transaksi digital dan mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan metode pembayaran yang lebih modern. Dengan demikian, pendampingan QRIS tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pembayaran digital, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.[7]

2. Pemetaan Lokasi UMKM Menggunakan Google Maps

Program digitalisasi selanjutnya dilakukan melalui pemetaan lokasi usaha menggunakan Google Maps. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan visibilitas UMKM sehingga lebih mudah ditemukan oleh masyarakat maupun calon konsumen. Pendampingan dilakukan melalui pengambilan titik koordinat lokasi usaha, pembuatan atau optimalisasi profil usaha pada Google Business Profile, serta pengunggahan informasi berupa alamat, jam operasional, nomor telepon, foto produk, dan dokumentasi tempat usaha.

Sebelum pelaksanaan program, sebagian besar UMKM di Desa Cikondang belum memiliki identitas digital berupa lokasi usaha yang terdaftar pada Google Maps. Akibatnya, calon konsumen mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi usaha, khususnya bagi konsumen yang berasal dari luar wilayah desa. Setelah proses pendampingan selesai, pelaku UMKM memiliki lokasi usaha yang dapat diakses secara digital sehingga memudahkan pencarian informasi serta meningkatkan peluang promosi berbasis lokasi.

Keberadaan lokasi usaha pada Google Maps memberikan nilai tambah bagi UMKM karena mampu meningkatkan aksesibilitas informasi, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kepercayaan konsumen melalui penyediaan informasi usaha yang lebih lengkap. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sudarman yang menjelaskan bahwa pemanfaatan Google Maps mampu meningkatkan visibilitas usaha sekaligus menjadi media promosi digital yang efektif bagi UMKM.[8] Penelitian Putri dan Prabowo juga menunjukkan bahwa

[7] Praditya Adi Nugroho et al., "Penerapan Sistem Digitalisasi UMKM Melalui QRIS , Google Maps , Dan Literasi Teknologi Masyarakat" 2, no. 1 (2023): 346–49.

[8] Kezia Grace Sudarman, Mohammad Ulil, and Albab Nur, "Peningkatan Literasi Digital UMKM Melalui Sosialisasi QRIS Dan Penyematan Usaha Pada Google Maps Di Kelurahan Sidodadi Surabaya" 5, no. 3 (2025): 1143–56.

digital mapping memberikan dampak positif terhadap perluasan jangkauan pasar karena konsumen lebih mudah menemukan lokasi usaha melalui platform digital. Oleh karena itu, pemanfaatan Google Maps merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang sederhana, mudah diterapkan, namun memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan daya saing UMKM.[9]

3. Seminar dan Sosialisasi Digitalisasi UMKM

Program pendukung lainnya berupa seminar dan sosialisasi mengenai digitalisasi UMKM yang diikuti oleh pelaku usaha, perangkat desa, serta masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya transformasi digital, strategi pemasaran digital, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi, penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran elektronik, pemanfaatan Google Maps sebagai media promosi berbasis lokasi, serta pengenalan literasi keuangan digital.

Kegiatan seminar dilaksanakan menggunakan metode diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis dalam penerapan teknologi digital pada usaha yang dijalankan. Pendekatan tersebut dinilai efektif mengingat sebagian besar pelaku UMKM di Desa Cikondang merupakan pelaku usaha mikro dengan tingkat literasi digital yang masih relatif rendah.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya digitalisasi sebagai strategi pengembangan usaha. Pelaku UMKM mulai memahami bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan promosi melalui media sosial, tetapi juga mencakup sistem pembayaran elektronik, pengelolaan identitas usaha secara digital, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen. Hasil ini mendukung penelitian Khassanah yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan digital mampu meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital.[10] Penelitian Sudarman juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital UMKM sangat dipengaruhi oleh

[9] Melinda Wahyuning Putri and Budi Prabowo, "Implementasi Program Digitalisasi UMKM Melalui Media Pembuatan QRIS Dan Google Maps Di Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo Melinda" 1, no. April (2025): 635–40.

[10] Khassanah et al., "Pengembangan Umkm Desa Melalui Digitalisasi : Studi Implementasi Qris , Shopee , Dan Shopee Food."

peningkatan literasi digital melalui edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan.[11]

Secara keseluruhan, implementasi digitalisasi melalui pendampingan QRIS, pemetaan Google Maps, serta seminar dan sosialisasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas UMKM di Desa Cikondang. Ketiga program tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha pada aspek transaksi digital, pemasaran berbasis teknologi, dan literasi digital. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendorong perluasan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing UMKM, serta mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui pemanfaatan teknologi digital.

Program pendampingan digitalisasi UMKM yang dilaksanakan setelah kegiatan seminar menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari keseluruhan pelaku UMKM yang didampingi, sebanyak 10 unit usaha berhasil mengaktifkan QRIS dan telah dapat digunakan sebagai metode pembayaran digital dalam transaksi sehari-hari. Selain itu, 10 tempat usaha juga berhasil memiliki titik lokasi yang terverifikasi di Google Maps, sehingga memudahkan masyarakat maupun calon konsumen dalam menemukan lokasi usaha. Capaian tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung perkembangan UMKM di Desa Cikondang.

Meskipun demikian, proses pendampingan di lapangan menghadapi beberapa kendala. Pada proses aktivasi QRIS, sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam proses verifikasi identitas karena data KTP dan rekening bank yang belum sesuai atau belum terhubung dengan baik. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran dari beberapa pelaku UMKM mengenai biaya transaksi serta proses pencairan dana hasil pembayaran melalui QRIS. Kendala tersebut diatasi dengan memberikan penjelasan secara langsung mengenai mekanisme penggunaan QRIS, biaya layanan yang berlaku, serta manfaat pembayaran digital bagi perkembangan usaha.

Pada pendampingan pembuatan titik lokasi usaha di Google Maps, kendala yang ditemukan yaitu kualitas sinyal internet yang kurang stabil di beberapa wilayah Desa Cikondang sehingga proses verifikasi lokasi memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, terdapat beberapa alamat usaha yang belum tercantum secara jelas pada sistem Google Maps sehingga

[11] Sudarman, Ulil, and Nur, "Peningkatan Literasi Digital UMKM Melalui Sosialisasi QRIS Dan Penyematan Usaha Pada Google Maps Di Kelurahan Sidodadi Surabaya."

diperlukan penyesuaian titik lokasi secara manual agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Untuk menjaga keberlanjutan program, tim KKN melakukan serah terima hasil pendampingan kepada pihak desa sebagai mitra lokal yang diharapkan dapat membantu memantau serta mendukung pelaku UMKM dalam memanfaatkan QRIS dan Google Maps. Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan panduan penggunaan dasar sehingga dapat mengelola akun dan memperbarui informasi usahanya secara mandiri apabila diperlukan. Dengan adanya pendampingan lanjutan dari pihak desa, diharapkan pemanfaatan teknologi digital tersebut dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing UMKM di Desa Cikondang.

Digitalisasi pengelolaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pemasaran dan transaksi, tetapi juga perlu memperhatikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Di tingkat daerah, pemberdayaan UMKM di Desa Cikondang memiliki landasan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Kedua peraturan tersebut menegaskan peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia, perlindungan usaha, peningkatan produktivitas, serta perluasan jaringan dan pemasaran. Dengan demikian, pendampingan digitalisasi melalui QRIS, Google Maps, dan peningkatan literasi digital dapat dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di daerah.

Dari sisi transaksi pembayaran, penggunaan QRIS perlu dilakukan melalui penyedia jasa pembayaran yang memiliki izin atau berada dalam pengawasan Bank Indonesia sesuai ketentuan sistem pembayaran, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Ketentuan tersebut menekankan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, andal, serta memperhatikan perlindungan pengguna jasa. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami prosedur transaksi, biaya yang berlaku, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala pembayaran. Sementara itu, pendaftaran informasi usaha pada Google Maps juga perlu memperhatikan pelindungan data pribadi. Apabila proses pendaftaran menggunakan data yang dapat mengidentifikasi pemilik usaha, pengumpulan dan penggunaannya harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aspek ini penting agar

pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keamanan informasi dan hak pihak yang datanya digunakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dapat disimpulkan bahwa kondisi digitalisasi UMKM di Desa Cikondang sebelum pelaksanaan program masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usahanya secara konvensional, baik dalam sistem pembayaran maupun pemasaran. Rendahnya literasi digital, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta dominasi pelaku usaha dari kelompok usia dewasa hingga lanjut usia menjadi faktor utama yang menghambat adopsi digitalisasi dalam pengembangan usaha. Akibatnya, potensi UMKM yang dimiliki Desa Cikondang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk.

Implementasi digitalisasi melalui pendampingan pembuatan QRIS, pemetaan lokasi usaha menggunakan Google Maps, serta seminar dan sosialisasi digitalisasi UMKM mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Pendampingan QRIS memberikan pemahaman mengenai penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang lebih praktis, aman, dan efisien. Pemetaan lokasi usaha melalui Google Maps meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas UMKM sehingga memudahkan konsumen memperoleh informasi mengenai lokasi usaha. Sementara itu, kegiatan seminar dan sosialisasi berhasil meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, khususnya terkait pemasaran digital, pemanfaatan teknologi informasi, dan pentingnya transformasi digital dalam pengembangan usaha.

Secara keseluruhan, ketiga program tersebut saling mendukung dalam memperkuat kemampuan pelaku UMKM pada aspek transaksi digital, promosi usaha, dan pemanfaatan teknologi sebagai strategi pengembangan usaha. Program ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, kegiatan digitalisasi UMKM yang dilaksanakan melalui program KKN dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Keberlanjutan program perlu didukung melalui pendampingan yang berkesinambungan oleh pemerintah desa, perguruan tinggi, dan

instansi terkait agar pemanfaatan QRIS, Google Maps, serta media digital lainnya tidak berhenti pada tahap implementasi awal, tetapi berkembang menjadi bagian dari strategi pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi digital UMKM di Desa Cikondang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa

DAFTAR PUSTAKA

Casmana, Nana, Ade Wikarta, and Sofi Defiyanti. "Usaha Dan Sebaran Wilayah Di Jawa Barat Dengan Clustering K-Means" 13, no. 3 (2023): 494–504.

Cianjur, Bupati. "Peratiuran Bupati Cianjur, Nomor: 15 Tahun 2023, Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro," 2023.

Dyana Chusnulitta Jatnika1, Dimas Dwiki Jatnika2, Muhamad Burhanudin3, Rizki Adam Kurniawan4. "Pemetaan Potensi Digitalisasi Pedesaan Dalam Program Akademi Desa Juara" 5, no. 2 (2024).

Khassanah, Annisa Uswatun, Iqbal Arrosyid, Laila Amalia, Nur Himatul Muna, Ghandi Krisna Palupi, and Isti Chana Zuliyati. "Pengembangan Umkm Desa Melalui Digitalisasi : Studi Implementasi Qris , Shopee , Dan Shopee Food" 8, no. 6 (2024): 4–12.

Listiyono, Hersatoto, Eko Nur Wahyudi, and Dwi Agus Diartono. "Dinamika Implementasi QRIS : Meninjau Peluang Dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia" 8, no. 2 (2024): 120–26.

Nugroho, Praditya Adi, Sayid Bahri Sriwijaya, Tika Kristianti, and Ratna Apriyanti. "Penerapan Sistem Digitalisasi UMKM Melalui QRIS , Google Maps , Dan Literasi Teknologi Masyarakat" 2, no. 1 (2023): 346–49.

Putri, Melinda Wahyuning, and Budi Prabowo. "Implementasi Program Digitalisasi UMKM Melalui Media Pembuatan QRIS Dan Google Maps Di Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo Melinda" 1, no. April (2025): 635–40.

Sudarman, Kezia Grace, Mohammad Ulil, and Albab Nur. "Peningkatan Literasi Digital UMKM Melalui Sosialisasi QRIS Dan Penyematan Usaha Pada Google Maps Di Kelurahan Sidodadi Surabaya" 5, no. 3 (2025): 1143–56.

Utami, E. Y., A. F. Lubis, and Herry Ramadhani. "The Effect of Regulatory Environment, External Financing, and Business Networks on MSME Growth in West Java." *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 3 (2024): 355–65.